

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang masih berkembang sehingga indonesia berupaya untuk meningkatkan pembangunan nasional. Pembangunan pada hakikatnya memiliki tujuan untuk menuju kemandirian dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.. Titik berat pembangunan dengan diiringi oleh kualitas sumber daya manusia yang memadai. Melihat titik tolak pembangunan nasional yang berada dibidang ekonomi tersebut maka pemerintah dengan rakyat memiliki kewajiban untuk terus menggali, mengelola dan membina potensi yang dimiliki seperti mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan aturan yang berlaku. Pemerintah daerah diberikan kewenangan penuh untuk mengurus dan mengelola sendiri kepentingan rumah tangganya. Kewenangan tersebut didasarkan pada otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya.¹

Indonesia adalah suatu negara kepulauan yang terdiri dari berbagai suku dan bangsa. Desa adalah suatu unit pemerintahan terkecil yang memiliki jumlah penduduk yang banyak. Desa adalah suatu wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang memiliki sistem pemerintahan sendiri yang dikepalai oleh kepala desa. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) desa adalah kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.

Perwujudan kesejahteraan utamanya dicapai melalui rencana pembangunan yang terencana, komprehensif, serta berjangka panjang. Dengan adanya pembangunan yang terencana akan memantu desa mapupun daerah tertinggal lainnya untuk membangun kemandirian dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata. Hal ini penting karena desa merupakan wilayah tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia.

¹ Aprianus jepri, "*strategi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam upaya mewujudkan kemandirian ekonomi melalui bumdes program pasar desa*", Jurnal ilmu sosial dan ilmu politik, no. 4 (2019): 303 -304.

Desa adalah unit analisis yang kuat, baik dalam arti materi maupun metafora. Komunitas desa tradisional sering diarak sebagai teladan kebajikan, dan desa modern sebagai versi asli yang rusak. J. Rigg menyatakan gagasannya tentang desa tradisional sebagai egaliter, mandiri, otonom, berorientasi pada subsistem, korporat, damai dan bermoral seringkali bertentangan dengan bukti bersejarah. Dengan itu, hal tersebut menyajikan kesulitan ketika citra desa digunakan untuk membangun visi tentang pembangunan yang seharusnya akan dilakukan dipedesaan yang berada di wilayah negara berkembang. Berdasarkan hal tersebut pandangan tentang desa saat ini dapat dijadikan sebagai miniatur pembangunan tingkat grassroots (akar rumput), dimana pembangunan hendaknya dilakukan ditingkat desa sebagai penopang pembangunan di tingkat daerah maupun nasional, tetapi untuk merealisasikan hal tersebut diperlukan kajian dan langkah yang mendalam.²

Dalam mewujudkan desa yang maju, kuat, serta mandiri diperlukan komitmen yang kuat oleh semua pihak dalam menggerakkan dan mengembangkan ekonomi di desa. Komitmen dari pemerintah desa dan masyarakat dalam menggerakkan roda perekonomian dengan membentuk lembaga ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa yang dikelola langsung oleh masyarakat dan pemerintah desa tanpa ada campur tangan dari pemerintah pusat. Dengan dibuatnya lembaga ekonomi desa dalam bentuk Badan Usaha Milik Desa menjadikan masyarakat lebih berdaya guna dengan mengandalkan sumber daya lokal yang ada di desa. Salah satu cara untuk mendorong pembangunan di pemerintahan tingkat desa yaitu pemerintah desa harus diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat dalam mengelola secara mandiri lingkup desa melalui lembaga-lembaga ekonomi di tingkat desa. Lembaga-lembaga tersebut salah satunya adalah Badan Usaha Milik Desa.³

Desa dituntut agar mandiri dalam menjalankan urusan pemerintahnya terutama dalam pengelolaan keuangan desa.

² Irfan Nursetiawan, *Strategi pengembangan desa mandiri melalui inovasi BUMDES*, FISIP Universitas Galuh, 72 - 73.

³ Kiki endah, "Mewujudkan kemandirian desa melalui pengelolaan badan usaha milik desa", jurnal moderat , no. 4. (2018): 25 -33.

Sumber pendapatan desa yang berasal dari pendapatan asli desa merupakan bentuk kemandirian desa dalam mengelola keuangan. Sehingga desa tidak tergantung dengan transfer dana yang berasal dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Dalam sistem pemerintahan yang ada saat ini, desa mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintah, termasuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagai langkah nyata pemerintah daerah dalam mendukung otonomi daerah diwilayahnya. Pemerintah desa khususnya kepala desa dalam membngun dan mengembangkan pemerintah dengan baik terutama dalam pengelolaan pendapatan. Baik tidaknya suatu pengelolaan bergantung pada tata kelola pemerintah desa itu sendiri, sehingga penting bagi pemerintah desa untuk mengetahui dan mengerti cara mengelola desa dengan baik. Mengingat dan menyadari adanya hambatan dalam pembangunan suatu daerah maka perlu suatu alternatif paradigma pembangunan yang baru, dimana semua kebutuhan masyarakat terjamin sampai ke pelosok desa sehingga dibutuhkan daerah otonom untuk agar bisa mengelola sumber-sumber pembiayaannya untuk mensejahterakan masyarakat secara menyeluruh.⁴

Beragam potensi desa sebagai daya tarik sumber pembangunan seharusnya dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para *stakeholder* (yang berkepentingan) dalam upaya kemajuan pembangunan yang merata. Diperlukan upaya khusus yang terstruktur dan terorganisir demi peningkatan taraf hidup masyarakat di pedesaan. Pengembangan basis ekonomi dipedesaan sudah semenjak lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program. Namun, upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya program-program tersebut. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi pemerintah yang terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin

⁴ Made sara dkk, "*Profesionalisme pengelolaan pendapatan asli desa untuk meningkatkan pembangunan ekonomi pedesaan*", ISEI Economic Review, no. 2 (2019) : 45-46.

ekonomi di pedesaan. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian .

Pendapatan asli desa dapat dikatakan sebagai petakan berkembang atau tidaknya suatu desa. Pengelolaan pendapatan asli desa dilakukan untuk menyelenggarakan pembangunan desa sebagai penambah atau pemasukan sumber pendapatan desa. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa khususnya dalam peningkatan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat pra-sejahtera, yakni dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa bertujuan sebagai penggerak pembangunan ekonomi lokal tingkat desa. Pembangunan ekonomi lokal desa ini didasarkan oleh kebutuhan, potensi, kapasitas desa dan penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa dengan tujuan akhirnya adalah meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa. Dasar pembentukan BUMDes sebagai lokomotif pembangunan di desa lebih dilatarbelakangi pada prakarsa pemerintah dan masyarakat desa dengan berdasarkan pada prinsip kooperatif, partisipatif, dan emansipatif dari masyarakat desa.

BUMDes diharapkan mampu menjadi motor penggerak kegiatan ekonomi di desa yang juga berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial, sedangkan sebagai lembaga komersial BUMDes bertujuan mencari keuntungan untuk meningkatkan pendapatan desa.⁵ BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan

⁵ Ahmad Nur Ihsan, "*Analisis pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDES) Gerbang Lentera sebagai penggerak Desa Wisata Lerep*", universitas Diponegoro, 3.

usaha lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pendirian BUMDes bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa, mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan atau dengan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

BUMDes juga diharapkan mampu menstimuli dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan. Aset perekonomian yang ada di desa harus dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Substansi dan filosofi BUMDes harus dijiwai dengan semangat kebersamaan dan *self help* sebagai upaya memperkuat aspek ekonomi kelembagaannya. Pada tahap ini, BUMDes akan bergerak seiring dengan upaya meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli desa, menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat dimana peran BUMDes sebagai institusi payung dalam menaungi . upaya ini juga penting dalam kerangka mengurangi peran *free-rider* yang seringkali meningkatkan biaya transaksi dalam kegiatan ekonomi masyarakat melalui praktek *rente*.

Namun dalam kenyataan lapangan bahwa pengelolaan Badan Usaha Milik Desa belum dapat dijalankan sebagaimana yang diharapkan. Masih muncul banyak permasalahan dalam pengelolaan BUMDES. Permasalahan itu muncul dari masyarakatnya maupun dari aparat desa sendiri.

Strategi pengelolaan BUMDes merupakan langkah yang dilakukan oleh pengurus BUMDes untuk mencapai tujuan jangka panjang. Telah banyak Badan Usaha Milik desa yang didirikan namun setelah didirikannya BUMDes tersebut kegiatan operasionalnya tidak berjalan dikarenakan berbagai faktor. Oleh karena itu perlu adanya strategi yang digunakan oleh setiap BUMDes agar kegiatan operasional dapat berjalan dan dapat mengembangkan potensi desa melalui BUMDes. Ketika BUMDes menghadapi permasalahan yang muncul maka untuk menyelesaikannya diperlukan suatu strategi. Dalam

memilih strategi dilihat dari berbagai segi dengan lingkup permasalahan yang dihadapi agar dapat menggunakan strategi yang tepat dalam pengembangan BUMDES.

Ekonomi Islam merupakan bentuk implementasi adanya aturan dalam Islam yang mengatur tentang adanya kegiatan ekonomi dan perilaku transaksi manusia dengan menggunakan persepektif ekonomi Islam yang bersumber kepada *Al-qur'an dan Hadist*. Pelaku ekonomi Islam dalam setiap kegiatannya selalu mengedepankan adanya nilai ketuhanan dalam setiap kegiatannya selaku dibarengi adanya niat dan harapan untuk mencari *ridho* berkah dari Allah SWT. ⁶Semakin berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia khususnya dalam bidng usaha, maka peluang berkembangnya usaha-usaha di Indonesia semakin terbuka lebar. Begitu juga peluang berkembangnya BUMDes ini, karean mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam.

Desa keben dalah salah satu desa yang memiliki Badan Usaha Milik desa (BUMDes) yang diberi nama “Sido Maju”. Desa keben ini terletak di kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati. BUMDes ini berdiri sejak tahun 2017 dan berjalan hingga sekarang. Di BUMDes “Sido Maju” ini menjalankan berbagai usaha yaitu berupa isi ulang air, penyedia alat-alat kematian, jasa sewa molen pengaduk semen dan sewa mobil. Namun pengelolaannya dirasa masih kurang dimanfaatkan dengan baik, dapat dilihat dari laporan keuangan dari tahun 2019 dan 2020 yang mengalami penurunan. Dapat dilihat dari laporan laba (pendapatan) BUMDes Sido Maju dibawah ini

Tabel 1.1
Pendapatan BUMDes Sido Maju ⁷

Tahun	Jumlah Pendapatan
2019	Rp 18.000.000,00
2020	Rp 16.000.000,00

⁶ St. Ferbia marwah dk, "*Strategi pengelolaan program badan usaha milik desa untuk kesejahteraan masyarakat dalam persepektif islam (studi pada masyarakat desa Tanjung lalak Utara)*", Universitas Islam Kalimantan.

⁷ Laporan Pertanggungjawaban BUMDes Sido Maju Tahun 2020

Dari tabel diatas menunjukkan adanya penurunan yang signifikan. Maka dari itu peneliti perlu diadakan penelitian agar mampu memecahkan masalah yang dialami oleh BUMDes Sido Maju saat ini dan dapat menentukan strategi pengelolaan yang tepat guna mengembangkan dan memaksimalkan BUMDes dalam pengelolaannya.

Maka dari permasalahan tersebut peneliti akan melakukan penelitian tentang **STRATEGI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus BUMDes “Sido Maju” Desa Keben Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati).** Sehingga dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada pembaca serta untuk meningkatkan desa dalam mengembangkan Badan Usaha Milik Desa(BUMDes).

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian memuat rincian tentang pernyataan cakupan topik pokok yang diungkap dalam penelitian. Sesuai dengan judul, maka fokus penelitian ini adalah mengenai strategi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dimana peneliti akan memfokuskan perhatiannya kepada peran pengelola BUMDes “Sido Maju” Desa Keben dalam melakukan pengelolaan BUMDes apakah sesuai perspektif ekonomi Islam atau belum sesuai dengan perspektif ekonomi Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan penjelasan diatas, maka peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana strategi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)“Sido Maju” Di Desa Keben Tambakromo ?
2. Apa saja kendala yang dialami oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Sido Maju” di Desa Keben Tambakromo ?
3. Bagaimana analisis ekonomi Islam terhadap strategi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Sido Maju” di Desa Keben Tambakromo ?

D. Tujuan Penelitian

Sebagaimana perumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui strategi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Sido Maju” Desa Keben Tambakromo Pati.
2. Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Sido Maju” Desa Keben Tambakromo Pati.
3. Untuk mengetahui bagaimana analisis ekonomi Islam terhadap strategi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Sido Maju” Desa Keben Tambakromo.

E. Manfaat Penelitian

Dari setiap penelitian tentunya akan memperoleh hasil yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti maupun pihak lain yang membutuhkan, terutama dalam hal pengembangan keilmuan dan praktik.

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memberi sumbangan berupa pengembangan ilmu pengetahuan yang terkait dengan strategi pengelolaan BUMDES. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumber referensi untuk penelitian selanjutnya.
- b. Memberikan bukti empiris kebenaran teori-teori tentang strategi pengelolaan BUMDes yang dalam penelitian ini dikaitkan dengan perspektif ekonomi Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi akademik (IAIN Kudus), penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur serta referensi yang dapat dijadikan bahan informasi bagi mahasiswa yang akan meneliti permasalahan yang serupa.
- b. Bagi pihak pengelola Desa dan BUMDes, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan untuk kebijakan pengambilan keputusan di masa yang akan datang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Keben melalui perbaikan

pengelolaan BUMDes“Sido Maju” secara lebih profesional.

- c. Bagi Penulis , Penelitian ini diharapkan dapat menerapkan dan membandingkan teori-teori yang telah diperoleh di bangku perkuliahan dan melihat, mengamati dan mengetahui keadaan sebenarnya yang dihadapi. Mampu mengembangkan wacana dan pemikiran dalam menerapkan teori khususnya terkait dengan strategi pengelolaan BUMDes.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini bermaksud untuk memberikan gambaran umum serta garis besar dari masing-masing bagian atau yang saling berhubungan. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

1. Bagian Awal

Bagian awal ini terdiri dari halaman judul, halaman sampul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, halaman abstrak, halaman daftar isi dan daftar tabel.

2. Bagian Isi

Pada bagian ini terdiri dari tiga bab, antara bab satu dengan bab yang lain saling berhubungan karena satu kesatuan yang utuh, ketiga bab tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitia, dan sistematika penulisan

BAB II : KERANGKA TEORI

Bab ini berisi tentang diskripsi teori, bagian ini dibutuhkan sebagai pijakan dasar untuk membangun kerangka fikir yang logis terkait dengan masalah yang akan dijawab dalam penelitian, serta berisi tentang penelitian terdahulu , kerangka berfikir dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan, *setting* penelitian, subyek penelitian, sumber data , teknik

pengumpulan data, teknik keabsahan data dan teknik analisis data.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bagian ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan berupa gambaran umum objek penelitian, deskripsi hasil penelitian serta analisis data dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

3. Bagian Akhir

Pada bagian ini berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup penulis.

